



Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut Dalam Mendukung Perekonomian Masyarakat

Development of Marine Transportation Infrastructure to Support Community Economy

Udi Junedi¹, Eliyanti Mokodompit²

Universitas Halu Oleo, Indonesia

Email: udijunedi06@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 10-06-2025

Revised : 12-06-2025

Accepted : 14-06-2025

Pulished : 16-06-2025

Abstract

Indonesia as an archipelagic country with 70% of its territory being ocean has great potential in developing the marine transportation sector to support the community's economy, especially in coastal and island areas. However, the low quality of marine transportation infrastructure causes logistical inefficiency, regional isolation, and high distribution costs of goods. This article aims to analyze the role of marine transportation infrastructure in community economic development, the challenges faced, and sustainable development strategies. The research method uses a descriptive-qualitative approach based on literature studies and secondary data from the Central Statistics Agency and related Ministries. The results of the study show that port development, modernization of the ship fleet, and integration of logistics systems are key factors in driving economic growth in coastal areas. In addition, a collaborative approach between the government and the private sector and data-based policies are needed to overcome structural and bureaucratic barriers. Planned and sustainable marine infrastructure contributes significantly to increasing connectivity, distribution of marine products, and business opportunities in the fisheries and marine tourism sectors.

Keywords: *Infrastructure, Marine transportation, coastal economy*

Abstract

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 70% wilayahnya berupa lautan memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor transportasi laut untuk menunjang perekonomian masyarakat, khususnya di daerah pesisir dan kepulauan. Namun demikian, rendahnya kualitas infrastruktur transportasi laut menyebabkan inefisiensi logistik, keterisolasian wilayah, dan tingginya biaya distribusi barang. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran infrastruktur transportasi laut dalam pembangunan ekonomi masyarakat, tantangan yang dihadapi, serta strategi pengembangan yang berkelanjutan. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif berbasis studi literatur dan data sekunder dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembangunan pelabuhan, modernisasi armada kapal, dan integrasi sistem logistik merupakan faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan pesisir. Selain itu, pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan swasta serta kebijakan berbasis data diperlukan untuk mengatasi hambatan struktural dan birokrasi. Infrastruktur laut yang terencana dan berkelanjutan berkontribusi nyata terhadap peningkatan konektivitas, distribusi hasil laut, serta peluang usaha di sektor perikanan dan pariwisata bahari.

Keywords: *Infrastruktur, Transportasi laut, ekonomi pesisir, tol laut, ekonomi.*



LATAR BELAKANG

Secara geografis posisi Indonesia yang berpotongan dengan samudra pasifik dan samudra hindia serta benua asia dan benua australia menjadikan wilayah laut Indonesia sebagai jalur lintasan perdagangan internasional. Letak Indonesia yang strategis juga berbatasan dengan 10 negara yaitu, Singapura, Malaysia, Filifina, Thailand, Vietnam, India, Papua Nugini, Timur Leste, Palau, dan Australia. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) luas wilayah perairan Indonesia 7,8 juta km² dan 2,55 juta km² diantaranya termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). United Nations Development Programme (UNDP) mengungkapkan bahwa 76% terumbu karang, 37% ikan karang di dunia berada di kawasan perairan Indonesia. Sebagai negara maritim dengan 70% wilayah lautan, Indonesia tentu saja menyimpan sejuta kekayaan alam bukan hanya sebatas minyak bumi tetapi juga rumput laut, terumbu karang, ikan dan lainnya menjadi potensi komoditas utama kelautan Indonesia (Adiyanto 2019). Dengan bermodalkan hal tersebut, Indonesia seharusnya mampu tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang besar bila dimanfaatkan secara maksimal. Kendati demikian kontribusi sektor perikanan terhadap produk domestik global (PDB) per tahun 2022 hanya sebesar 2,54% dan masih banyak para nelayan yang berada ditaraf hidup miskin, angka ini terbilang sedikit untuk ukuran Indonesia yang merupakan negara bahari (KKP, 2022).

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan memiliki garis pantai sepanjang 99.093 km. Posisi geografis yang strategis, yaitu terletak di antara Samudra Pasifik dan Hindia serta berbatasan langsung dengan 10 negara, menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional utama. Kekayaan laut Indonesia meliputi 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan 76% terumbu karang dunia yang menjadikan sektor maritim sebagai potensi ekonomi unggulan. Sayangnya, kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih relatif kecil, yakni sekitar 2,54% pada tahun 2022 [2]. Salah satu penyebabnya adalah minimnya infrastruktur transportasi laut yang memadai, khususnya di wilayah pesisir dan terpencil. Infrastruktur transportasi laut memiliki peran sentral dalam mendorong konektivitas, menurunkan biaya logistik, mempercepat distribusi barang, dan membuka akses pasar yang lebih luas bagi masyarakat pesisir.

Ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat mendukung pelayanan dasar dengan menghubungkan kegiatan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia, sehingga dapat mendorong pemerataan pembangunan nasional serta meningkatkan produktivitas, daya saing, dan peluang investasi. Menurut Robertson dan Sribar (2001), infrastruktur adalah istilah yang berkaitan dengan makna “suatu struktur yang ada di bawah struktur”, yaitu adanya lapisan-lapisan yang saling mendukung dan melayani. Pembangunan infrastruktur transportasi kelautan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Jaringan transportasi memiliki peran fundamental bagi kondisi negara kepulauan seperti Indonesia. Dalam mendukung industri perikanan, serta mendorong perkembangan sektor pariwisata bahari. Oleh karena itu, diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur transportasi yang terencana dan terkoordinasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sehinggam Artikel ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi pembangunan infrastruktur transportasi laut dalam mendukung perekonomian masyarakat, (2) menganalisis dampak infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, dan (3) mengevaluasi tantangan dan solusi dalam pengembangan infrastruktur maritim secara berkelanjutan.



Kajian Teoritis

a. Teori Infrastruktur

Infrastruktur merupakan fondasi dari pembangunan ekonomi suatu negara. Robertson dan Sribar (2001) mendefinisikan infrastruktur sebagai sistem fisik dan organisasi yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam konteks kelautan, infrastruktur transportasi laut mencakup pelabuhan, dermaga, fasilitas bongkar muat, armada kapal, serta sistem navigasi dan logistik yang memungkinkan distribusi barang dan mobilitas penduduk secara efisien. Keberadaan infrastruktur yang memadai meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperkecil kesenjangan antar daerah, serta mendorong arus perdagangan dan investasi.

b. Teori Pembangunan Ekonomi Maritim

Teori ini menempatkan wilayah pesisir dan kelautan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam laut. Menurut pendekatan ekonomi wilayah, pertumbuhan ekonomi akan meningkat seiring dengan aksesibilitas yang lebih tinggi terhadap pasar, infrastruktur, dan jaringan distribusi. Negara kepulauan seperti Indonesia sangat bergantung pada efisiensi transportasi laut dalam mempercepat aliran komoditas, jasa, dan tenaga kerja. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur laut bukan sekadar penguatan fisik, tetapi juga menciptakan multiplier effect terhadap sektor perikanan, industri pengolahan hasil laut, pariwisata bahari, dan jasa logistik.

c. Konsep *Blue Economy*

Konsep blue economy atau ekonomi biru merupakan paradigma pembangunan berkelanjutan yang menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya laut secara optimal tanpa merusak ekosistem. Berdasarkan definisi UNEP (2015), blue economy mencakup pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian lingkungan laut. Dalam pembangunan infrastruktur, pendekatan blue economy mendorong penggunaan teknologi hijau, pengelolaan kawasan pesisir secara inklusif, dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati laut. Infrastruktur laut yang dikembangkan berdasarkan prinsip ini akan memiliki daya dukung ekologis dan sosial jangka panjang.

d. Teori Konektivitas dan Integrasi Wilayah

Konektivitas adalah kemampuan wilayah untuk terhubung secara fisik dan fungsional dalam suatu sistem ekonomi nasional dan global. Menurut teori konektivitas wilayah (Rodrigue et al., 2017), infrastruktur transportasi laut berperan dalam memperkecil hambatan spasial dan memperluas jangkauan pasar. Hal ini penting untuk negara dengan kondisi geografis kepulauan, di mana transportasi darat tidak mampu menjangkau seluruh wilayah. Infrastruktur pelabuhan yang terhubung dengan pusat produksi, pusat distribusi, dan pelaku usaha lokal dapat menciptakan rantai pasok maritim yang efisien.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan memahami fenomena pembangunan infrastruktur transportasi laut secara menyeluruh. Fokus penelitian diarahkan pada wilayah pesisir dan kepulauan di Indonesia, dengan



mempertimbangkan keterkaitan antara infrastruktur, ekonomi lokal, dan kebijakan pembangunan nasional.

Sumber data utama berasal dari sumber sekunder yang meliputi:

- a. Dokumen kebijakan pemerintah: RPJMN 2025–2029, Strategi Nasional Ekonomi Biru, dokumen Kementerian Perhubungan.
- b. Statistik nasional: data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait PDB sektor transportasi, tol laut, dan volume logistik.
- c. Kajian ilmiah dan laporan institusi seperti LIPI, World Bank, dan UNEP.

Teknik Pengumpulan Data melalui studi pustaka dengan mengakses jurnal, laporan kebijakan, data statistik, serta berita dan artikel yang relevan dari tahun 2019 hingga 2024. Pengumpulan dilakukan secara sistematis untuk menjamin akurasi dan keterkinian informasi.

Data dianalisis menggunakan pendekatan tematik dan induktif. Prosedur analisis melibatkan:

- a. Klasifikasi data berdasarkan tema (identifikasi infrastruktur, dampak ekonomi, tantangan-solusi).
- b. Penafsiran hubungan antara infrastruktur laut dan perekonomian masyarakat.
- c. Pemanfaatan kerangka triple bottom line (ekonomi, sosial, lingkungan) sebagai alat evaluatif untuk menilai keberlanjutan program infrastruktur laut.

Untuk memastikan validitas data, dilakukan triangulasi sumber data dengan membandingkan informasi dari dokumen pemerintah, kajian akademik, dan laporan internasional. Selain itu, keandalan diperkuat dengan mencantumkan sumber resmi dan literatur bereputasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Infrastruktur Transportasi Laut

Infrastruktur transportasi laut mencakup pelabuhan, kapal pengangkut, jalur pelayaran, serta sistem logistik dan distribusi barang. Di Indonesia, pengembangan pelabuhan dan kapal niaga masih menghadapi tantangan berupa kapasitas terbatas, peralatan bongkar muat yang usang, serta ketergantungan pada pelabuhan utama seperti Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Kondisi ini menyebabkan disparitas harga di wilayah timur Indonesia yang jauh dari pusat logistik nasional. Program tol laut yang diluncurkan oleh pemerintah bertujuan menjawab persoalan tersebut. Dengan 39 trayek dan 115 pelabuhan singgah, tol laut telah memperbaiki distribusi barang, menurunkan biaya logistik, dan membuka konektivitas antarwilayah, terutama pulau-pulau kecil dan terpencil. Di sisi lain, masih banyak daerah yang belum sepenuhnya terintegrasi karena keterbatasan infrastruktur penunjang di darat seperti jalan pelabuhan dan gudang penyimpanan. Jika pelabuhan melakukan tugasnya dengan baik dan berhasil, mereka memiliki dampak yang signifikan bagi bangsa. Kontribusi dalam konteks ini tidak selalu mengacu pada keuntungan moneter dari suatu pelabuhan, tetapi lebih kepada dampak yang baik, terutama pada kehidupan ekonomi di daerah pedalaman (di belakang kawasan industri), dimana pelabuhan berfungsi sebagai infrastruktur ekonomi. Elemen kunci dalam pengembangan kegiatan ekonomi dalam dan luar negeri suatu negara adalah peran pelabuhan sebagai pintu masuk kapal suatu negara.



Dampak Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut terhadap Perekonomian Masyarakat

Peningkatan konektivitas laut telah memberikan dampak langsung terhadap ekonomi lokal. Di daerah seperti Maluku dan NTT, kehadiran kapal tol laut mampu menurunkan harga sembako hingga 20%. Hal ini terjadi karena distribusi barang menjadi lebih cepat dan murah. Selain itu, para nelayan dan pelaku usaha kelautan mendapat akses pasar yang lebih luas untuk menjual hasil tangkapan mereka ke daerah lain. Industri pengolahan hasil laut juga berkembang di beberapa daerah pesisir, menciptakan lapangan kerja baru di sektor pengemasan dan ekspor.

Dengan infrastruktur yang memadai, rantai pasok dari produsen ke konsumen menjadi lebih efisien. Dari sisi statistik, sektor angkutan laut menunjukkan tren positif. Pertumbuhan PDB dari angkutan laut mencapai 15,47% pada tahun 2023, jauh meningkat dibandingkan tahun 2020 yang berada pada angka -4,57%. Angka ini mencerminkan bahwa sektor transportasi laut memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi secara agregat.

Tantangan dan Solusi dalam Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut

Beberapa tantangan besar dalam pengembangan infrastruktur laut di Indonesia meliputi:

- a. Keterbatasan anggaran pembangunan.
- b. Proses birokrasi yang lambat dan perizinan yang tumpang tindih.
- c. Rendahnya minat investasi swasta di wilayah terpencil.
- d. Kurangnya SDM dan teknologi modern dalam pengelolaan pelabuhan kecil.

Solusi yang dapat diterapkan meliputi:

- a. Mendorong model Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
- b. Digitalisasi sistem logistik dan pelabuhan.
- c. Deregulasi perizinan dan penyederhanaan prosedur investasi.
- d. Pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal untuk terlibat dalam operasional pelabuhan.

Studi Kasus: Efektivitas Tol Laut dan Perekonomian Maluku Tenggara

Program tol laut merupakan salah satu inisiatif strategis pemerintah dalam menjembatani kesenjangan antarwilayah, khususnya antara Indonesia bagian barat dan timur. Salah satu contoh konkret implementasi program ini dapat dilihat di Kabupaten Maluku Tenggara. Sebelum adanya tol laut, distribusi logistik ke wilayah ini sangat tergantung pada kapal-kapal swasta yang tidak memiliki jadwal tetap, sehingga harga barang kebutuhan pokok sangat fluktuatif dan cenderung tinggi. Misalnya, harga semen bisa mencapai dua kali lipat dibandingkan harga di Makassar atau Surabaya. Setelah trayek tol laut mulai rutin melayani pelabuhan Tual, beberapa perubahan positif mulai dirasakan masyarakat. Berdasarkan laporan dari Dinas Perdagangan setempat, harga barang pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng menjadi lebih stabil dan kompetitif. Pemerintah daerah melaporkan penurunan rata-rata harga hingga 18% dalam dua tahun terakhir. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan daya beli masyarakat. Selain itu, nelayan dan pelaku UMKM perikanan mengalami peningkatan akses pasar. Dengan adanya jadwal pengangkutan yang lebih



pasti, hasil tangkapan dan produk olahan ikan seperti abon dan kerupuk laut dapat dipasarkan ke wilayah lain melalui kontainer tol laut. Pelaku UMKM setempat menyebutkan peningkatan volume penjualan hingga 25% sejak adanya konektivitas logistik yang terjamin. Namun, tantangan tetap ada, seperti belum optimalnya muatan balik dari wilayah timur ke barat. Beberapa pelabuhan pengumpul juga masih belum memiliki fasilitas penyimpanan dingin yang memadai untuk komoditas perishable. Oleh karena itu, studi kasus Maluku Tenggara menunjukkan pentingnya integrasi infrastruktur pendukung darat dan laut serta keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam mengelola dampak program tol laut.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pembangunan infrastruktur transportasi laut memberikan dampak signifikan dalam mempercepat distribusi barang, menstabilkan harga, serta membuka peluang ekonomi masyarakat pesisir. Seluruh sektor usaha memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan sektor yang didorong oleh industri transportasi laut yang tumbuh sebesar 10,35% pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat jika transportasi laut didukung dengan pembangunan infrastruktur yang baik dan akan berdampak yang signifikan bagi bangsa. Investasi pada pelabuhan, kapal, dan sistem logistik menjadi keharusan untuk menciptakan konektivitas maritim yang efisien dan inklusif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transportasi laut bukan hanya alat mobilitas, tetapi juga katalisator pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dari Kesimpulan diatas maka sehingga Rekomendasi strategis yang dapat dilakukan meliputi:

1. Penguatan Kebijakan dan Regulasi: Pemerintah perlu menyusun regulasi yang mendukung percepatan pembangunan infrastruktur transportasi laut, termasuk penyederhanaan birokrasi dan harmonisasi lintas sektor.
2. Optimalisasi Program Tol Laut: Perlu dilakukan penyesuaian trayek berdasarkan kebutuhan ekonomi daerah, peningkatan efisiensi distribusi, serta penguatan sistem muatan balik.
3. Peningkatan Investasi Infrastruktur: Pemerintah dan swasta perlu bersinergi dalam membangun pelabuhan modern, dermaga, dan fasilitas pendukung lainnya melalui skema KPBU atau insentif fiskal.
4. Pemberdayaan Masyarakat Lokal: Libatkan masyarakat pesisir dalam pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas pelabuhan, termasuk pelatihan SDM dan pembinaan UMKM berbasis kelautan.
5. Digitalisasi dan Teknologi: Integrasi teknologi informasi dalam sistem pelabuhan, logistik, dan monitoring distribusi perlu dioptimalkan untuk mendukung efisiensi dan transparansi.
6. Penguatan Sistem Data dan Evaluasi: Penting untuk membangun sistem informasi maritim nasional yang komprehensif sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis data.

Melalui langkah-langkah tersebut, pembangunan infrastruktur transportasi laut akan semakin berperan dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional serta memastikan kesejahteraan masyarakat pesisir secara merata dan berkelanjutan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik. Statistik Transportasi Laut 2023. Jakarta: BPS RI; 2024.
- Bappenas. RPJMN 2025–2029. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas; 2023.
- LIPI. Evaluasi Dampak Tol Laut terhadap Ekonomi Kawasan Timur. Jakarta: LIPI Press; 2022.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. Statistik Kelautan dan Perikanan 2022. Jakarta: KKP RI; 2023.
- Kementerian Perhubungan. Evaluasi Program Tol Laut. Jakarta: Kemenhub; 2023.
- Rodrigue JP, Comtois C, Slack B. The Geography of Transport Systems. 4th ed. New York: Routledge; 2017.
- Robertson DS, Sribar K. Infrastructure and the economy: Foundations of modern growth. Washington DC: World Bank; 2001.
- UNEP. Blue Economy: Shared Prosperity for a Healthy Ocean. Nairobi: United Nations; 2015.
- World Bank. Maritime transport and infrastructure for island nations. Washington DC: WB; 2018.